

Kivlan Zen Tuduh Tiga Partai Pendukung Jokowi Gandeng Komunis

Tim, CNN Indonesia | Sabtu, 13/10/2018 23:08 WIB



Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen menyindir soal negara Pancasila Masa negara Pancasila yang bekerja sama dengan negara komunis. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen menyebut tiga partai pengusung petahana Joko Widodo menjalin kerja sama dengan China soal paham komunisme. Kivlan menuding ada kerja sama kaderisasi paham komunisme yang dijalin PDIP, NasDem, Golkar dengan Partai Komunis China.

"PDIP tanda tangan bersama untuk pengaderan, sekarang NasDem juga ikut dengan Partai Komunis China untuk melakukan pengaderan," kata Kivlan dalam diskusi 'Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019' di Jakarta, Sabtu (13/10).

"Golkar juga ikut setelah yang [Setya Novanto] masuk pe njara ini. Sama-sama tanda tangan pengaderan dari China. Masa negara Pancasila kerja sama dengan negara komunis?" lanjut Kivlan.

Lihat juga: [FPI Ungkap Alasan Bagi Buku PKI di Doa Bersama untuk Rizieq](#)

Selain itu, Kivlan juga menuduh Jokowi mendapa t suntikan dukungan dalam Pilpres 2019 dari golongan yang ia sebut Partai Komunis Indonesia (PKI). Tanpa menunjukkan bukti konkret, ia menceritakan bahwa golongan yang ia sebut PKI telah menyambangi Jokowi saat masa kampanye lima tahun lalu.

Kala itu golongan yang ia sebut PKI disebut menyiapkan dukungan lima belas juta suara

untuk Jokowi. Kivlan berujar dukungan itu diberikan dengan syarat Jokowi mewakili negara untuk meminta maaf kepada PKI.



(lihat infografis).

Lihat juga: [Kebangkitan 'Hantu PKI' dan Komitmen Penyelesaian Tragedi 65](#)

Tempuh jalur hukum

Menanggapi tuduhan tersebut kubu Jokowi tidak akan tinggal diam. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Mohamad Guntur Romli menyampaikan pihaknya bakal menyeret penyebar hoaks soal Komunis, Jokowi dan pendukungnya ke jalur hukum.

Guntur menegaskan tindakan tegas terutama dilakukan pada hoaks yang menyebut Jokowi sebagai bagian dari PKI.

"Tentu saja langkah hukum, siapa saja yang memfitnah, memberikan hoaks, mengaitkan Pak Jokowi dengan PKI, maka dia harus berhadapan dengan hukum," ucap Guntur saat

dimintai tanggapan terkait pernyataan Kivlan Zen soal partai pendukung Jokowi dan PKI tersebut.

Lihat juga: [Lagu 'Ganyang PKI' Bergema di Monas Usai UAS Doakan Riziek](#)

(dhf/agt) *CNN Indonesia* Membutuhkan Partisipasi Anda. [Ayo Ikuti Survei Ini!](#)

Kivlan Sebut

HTI Cuma Jalankan Petunjuk Tuhan dalam Kehidupan

Tim, CNN Indonesia | Minggu, 14/10/2018 06:20 WIB



Menurut Kivlan, HTI tak memaksakan kehendak mendorong ideologi di Indonesia, berbeda dengan PKI yang memaksakan ideologi komunis. (CNN Indonesia/M Andika Putra)

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen menyindir pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) soal gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kivlan menilai, HTI tak berniat mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai ideologi Indonesia. Menurutnya, gerakan HTI hanyalah upaya untuk menerapkan petunjuk Allah SWT ke dalam kehidupan.

"Kalau dengan cara pikir HTI, ya cara berpikir untuk menerapkan petunjuk Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu takut," kata Kivlan dalam diskusi 'Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019' di Jakarta, Sabtu (13/10).

Lihat juga: [Kivlan Zen Tuduh Tiga Partai Pendukung Jokowi Gandeng Komunis](#)

Kivlan lantas membandingkan HTI dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kivlan berpendapat PKI jelas memaksakan ideologinya yakni komunis di Indonesia.

Tanpa memaparkan data, Kivlan menyebut PKI membantai ulama dan santri yang tidak setuju dengan ideologi komunis.

"Jadi jangan takut sama HTI, lebih bahaya komunis," klaim dia.

Pada diskusi yang sama, Ketua Bidang Kajian dan Hubungan Strategis PP GP Anshor Mohammad Nuruzzaman membantah klaim Kivlan.

Penulis buku Catatan Hitam Hizbut Tahrir itu mencontohkan gerakan HT di Timur Tengah. Seperti upaya kudeta militer di Irak, Suriah, dan Yordania. Nuruzzaman mengatakan Hizbut Tahrir berusaha mengganti sistem demokrasi yang mereka anggap thagut alias jalan setan.

"Kami di GP Anshor berpendapat kalau dibiarkan, HTI bisa melakukan kudeta di Indonesia," tutur dia.

Lihat juga: [Banding Ditolak, HTI Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung](#)

Sebelumnya, pada 2017 lalu, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 untuk mencabut status badan hukum HTI.

HTI mengajukan gugatan terhadap Menkumham ke PTUN. Namun pada 7 Mei 2018, PTUN memutus surat yang diterbitkan Menkumham sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Pun, demikian di tingkat banding, permohonan HTI ditolak pengadilan tinggi. Selanjutnya, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Ismail menuturkan, pengajuan kasasi ini merupakan bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang menimpa HTI.

"Inshaallah kami akan kasasi," ujar Ismail saat dikonfirmasi melalui pesan singkat kepada *CNNIndonesia.com*, Rabu (26/9). (dhf/kid)

CNN Indonesia Membutuhkan Partisipasi Anda. [Ayo Ikuti Survei Ini!](#)

